

## "PENGARUH KEBIJAKAN KESEHATAN TERHADAP AKSES DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN: STUDI LITERATUR"

Nadiah Wulandari<sup>1</sup>, Preti Sinta Harahap<sup>2</sup>, Sri Hajijah Purba<sup>3</sup>, Anisa Ayu Lestari<sup>4</sup>, Yayang Nisrina Hasibuan<sup>5</sup>

[nadiahwulandari13@gmail.com](mailto:nadiahwulandari13@gmail.com)<sup>1</sup>, [sintapreti1@gmail.com](mailto:sintapreti1@gmail.com)<sup>2</sup>, [srihajijah20@gmail.com](mailto:srihajijah20@gmail.com)<sup>3</sup>,

[lestarianisaayu7@gmail.com](mailto:lestarianisaayu7@gmail.com)<sup>4</sup>, [yayangnisrina@gmail.com](mailto:yayangnisrina@gmail.com)<sup>5</sup>

universitas Islam negeri Sumatra Utara

### ABSTRAK

Kebijakan kesehatan memiliki peran krusial dalam menentukan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan kesehatan terhadap akses dan kualitas layanan kesehatan melalui tinjauan literatur yang komprehensif. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku, laporan resmi, dan dokumen kebijakan dari berbagai negara. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan yang inklusif dan berbasis bukti dapat meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Selain itu, kebijakan yang mendukung peningkatan sumber daya manusia dan teknologi kesehatan terbukti memperbaiki kualitas layanan yang diberikan. Sebaliknya, kebijakan yang tidak tepat dapat menyebabkan ketimpangan akses dan penurunan kualitas layanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perumusan dan implementasi kebijakan kesehatan yang efektif sangat penting untuk mencapai sistem kesehatan yang adil dan berkualitas tinggi. Saran kebijakan meliputi perlunya evaluasi berkala, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, serta penyesuaian kebijakan berdasarkan data dan kebutuhan lokal.

**Kata Kunci:** kebijakan kesehatan, akses layanan kesehatan, kualitas layanan kesehatan, evaluasi kebijakan.

### PENDAHULUAN

Kebijakan Kesehatan merupakan Sekumpulan keputusan yang dibuat pemerintah berhubungan dengan kesehatan. Kebijakan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kebijakan inti mengenai kesehatan nasional dirumuskan dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 mengenai Sistem Kesehatan Nasional (Budiyanti,dkk. 2020).

Kebijakan kesehatan yang efektif dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan menerapkan berbagai kebijakan.

Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan yang sangat penting dan dibutuhkan 24 jam karena kesehatan merupakan salah satu hak paling besar yang dimiliki oleh masyarakat dan harus selalu dipenuhi. Setiap masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan baik dari lapisan masyarakat kaya maupun masyarakat miskin. Sistem Pelayanan Kesehatan adalah suatu bentuk usulan yang terdiri dari berbagai elemen kesehatan yang berkaitan secara teratur dengan tujuan mempromosikan dan memulihkan atau menjaga kesehatan perorangan, keluarga dan kelompok masyarakat.

Kualitas pelayanan sebagai tingkat kemampuan yang dilakukan untuk memberikan mutu yang terbaik atas keunggulan supaya memberikan hasil yang maksimal. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal sangat membutuhkan kerjasama tim yang baik, sehingga kualitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh setiap layanan kesehatan dapat

memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat atau pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan tujuan menciptakan kepuasan bagi masyarakat atau pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui kebijakan pembangunan kesehatan. Hal ini kebijakan menjadi salah satu komponen yang paling utama bagi setiap penyelenggara pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan mempunyai hubungan yang positif dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Konsep tersebut yaitu meliputi infrastruktur, kualitas personel, proses pelayanan klinis, proses administrasi, keamanan, kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan (Nugraha, dkk. 2023).

Fasilitas kesehatan harus mudah diakses oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang tinggal di daerah terpencil atau daerah yang sulit dijangkau. Hal ini dapat dicapai melalui pembangunan fasilitas kesehatan di daerah-daerah tersebut, atau dengan memastikan bahwa transportasi publik tersedia dan mudah diakses. Kualitas fasilitas kesehatan harus memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Hal ini meliputi fasilitas yang memadai, dokter dan tenaga medis yang terlatih, serta penggunaan teknologi medis yang modern. Fasilitas kesehatan harus terjangkau oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa biaya yang dikenakan tidak terlalu tinggi dan ada program-program kesehatan yang dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Fasilitas kesehatan juga dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program promosi Kesehatan. Program ini dapat berupa penyuluhan tentang gaya hidup sehat, vaksinasi, dan lain sebagainya (Tambaip, dkk. 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah studi literatur review, yaitu suatu studi yang digunakan dengan tujuan untuk menganalisis berdasarkan dari berbagai literatur yang telah dipilih dan dari sumber-sumber ilmiah sehingga dapat menjadi suatu kesimpulan dan bahkan dapat menjadi sebuah gagasan-gagasan baru. Penelusuran penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan beberapa artikel literatur ini menggunakan sumber pencarian online melalui Google Scholar dan basis data jurnal. Penulis telah menelaah artikel dan hasilnya didapatkan sebanyak 5 artikel. Artikel yang didapat tersebut telah dinilai kelayakannya yaitu berdasarkan relevansi materi atau topik artikel yang dibahas, bahasa yang telah digunakan, kelengkapan teks artikel tersebut, open access journal, dan update penelitian terbaru, artikel sudah memiliki International Standard Serial Number (ISSN) sebagai jaminan atas kualitas dan mutu dari artikel tersebut mengenai pengaruh kebijakan terhadap akses dan kualitas layanan kesehatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Akses Layanan Kesehatan**

Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Studi oleh Nurhadi et al. (2023) menunjukkan bahwa JKN telah meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin dan di daerah terpencil. Penelitian ini menemukan peningkatan signifikan dalam jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan setelah penerapan JKN.

Distribusi Tenaga Kesehatan: Penelitian oleh Setiawan et al. (2022) menemukan bahwa kebijakan redistribusi tenaga kesehatan ke daerah terpencil di Indonesia telah berhasil meningkatkan akses layanan kesehatan di wilayah-wilayah tersebut.

### **2. Kualitas Layanan Kesehatan**

Standar Pelayanan Minimum (SPM): Menurut penelitian oleh Sari et al. (2023), penerapan SPM di puskesmas dan rumah sakit umum telah meningkatkan kualitas layanan

yang diberikan dan kepuasan pasien.

Pelatihan dan Pendidikan Tenaga Kesehatan: Studi oleh Rahmat et al. (2023) menunjukkan bahwa kebijakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan berpengaruh positif terhadap peningkatan kompetensi dan kualitas layanan yang diberikan.

Pembahasan

#### 1. Kebijakan JKN

Peningkatan Akses: Kebijakan JKN telah secara signifikan meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah dan rentan. Namun, penelitian menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan yang harus diatasi melalui kebijakan yang lebih inklusif dan pemerataan distribusi sumber daya kesehatan.

Implikasi Ekonomi: Studi oleh Wulandari et al. (2023) menekankan bahwa kebijakan JKN tidak hanya mengurangi beban finansial individu tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

#### 2. Distribusi Tenaga Kesehatan

Keberhasilan Redistribusi: Penelitian menunjukkan bahwa redistribusi tenaga kesehatan telah berhasil meningkatkan akses di daerah-daerah yang sebelumnya kekurangan tenaga medis. Setiawan et al. (2022) mengungkapkan bahwa insentif finansial dan program dukungan lainnya memainkan peran penting dalam keberhasilan kebijakan ini.

Tantangan Implementasi: Tantangan utama yang dihadapi termasuk kurangnya fasilitas yang memadai dan dukungan logistik di daerah-daerah terpencil. Hal ini memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan redistribusi.

#### 3. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Meningkatkan Kualitas Layanan: Standar pelayanan minimum telah terbukti meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara signifikan. Sari et al. (2023) menunjukkan peningkatan dalam indikator kualitas seperti kepuasan pasien, waktu respon, dan tingkat kesembuhan pasien.

Monitoring dan Evaluasi: Diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang kuat untuk memastikan standar ini diterapkan dengan konsisten di seluruh fasilitas kesehatan.

#### 4. Pelatihan dan Pendidikan Tenaga Kesehatan

Peningkatan Kompetensi: Pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan tenaga kesehatan. Rahmat et al. (2023) menemukan bahwa program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara signifikan.

Sustainability Pelatihan: Tantangan sustainability pelatihan mencakup keterbatasan anggaran dan sumber daya. Kebijakan yang mendukung pendanaan jangka panjang untuk program pelatihan sangat diperlukan untuk memastikan peningkatan kualitas yang berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan kesehatan memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Studi literatur menunjukkan bahwa kebijakan yang efektif telah berhasil memperluas akses layanan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat di daerah terpencil. Melalui kebijakan seperti penyediaan layanan kesehatan gratis atau subsidi, pembangunan infrastruktur kesehatan, dan distribusi tenaga medis yang lebih merata, jumlah orang yang dapat mengakses layanan kesehatan meningkat secara signifikan.

Selain itu, kebijakan yang tepat juga berdampak positif pada peningkatan kualitas

layanan kesehatan. Pelatihan dan pengembangan tenaga medis, penerapan standar layanan kesehatan yang ketat, serta integrasi teknologi kesehatan telah berkontribusi pada perbaikan dalam diagnosis, perawatan, dan manajemen pasien. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan disparitas akses dan kualitas di berbagai wilayah. Kendala seperti keterbatasan anggaran, infrastruktur yang tidak memadai, dan birokrasi yang kompleks sering kali menghambat efektivitas kebijakan kesehatan.

Studi ini menekankan pentingnya kebijakan kesehatan yang berbasis bukti untuk mencapai hasil yang optimal. Kebijakan yang didukung oleh penelitian ilmiah dan data empiris cenderung lebih efektif dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Kolaborasi antara pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi kesehatan sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang tepat sasaran.

Secara keseluruhan, kebijakan kesehatan memiliki dampak signifikan terhadap akses dan kualitas layanan kesehatan. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada implementasi yang efektif, dukungan sumber daya yang memadai, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Upaya berkelanjutan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat yang berubah terus menerus sangat penting untuk mencapai sistem kesehatan yang lebih adil dan berkualitas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Nugraha, A., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2023). Penerapan Konsep "Quality of Care" Dalam Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Kesehatan. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 259-266.
- Budiyanti, dkk. 2020. Implementasi Kebijakan Kesehatan. Semarang: UNDIP PRESS.
- Nurhadi, H., et al. (2023). "Dampak JKN terhadap Akses Layanan Kesehatan di Indonesia." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*.
- Putri, A., et al. (2022). "Redistribution of Healthcare Workers to Remote Areas: An Evaluation Study." *Health Policy and Planning*.
- Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2023). PERAN FASILITAS KESEHATAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 189-196.
- Rahman, F., et al. (2022). "Continuous Medical Education and Its Impact on Healthcare Quality: Evidence from Indonesia." *BMC Medical Education*.
- Rahmat, A., et al. (2023). "Pelatihan Berkelanjutan dan Kualitas Layanan Kesehatan." *Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia*.
- Sari, D., et al. (2023). "Penerapan Standar Pelayanan Minimum di Fasilitas Kesehatan Publik." *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*.
- Setiawan, I., et al. (2022). "Evaluasi Kebijakan Redistribusi Tenaga Kesehatan di Daerah Terpencil." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*.
- Susilo, T., et al. (2023). "Impact of National Health Insurance on Healthcare Access in Indonesia: A Longitudinal Study." *Journal of Public Health*.
- Wahyuni, S., et al. (2023). "Effectiveness of Minimum Service Standards in Improving Patient Satisfaction in Public Health Centers." *International Journal of Health Services*.
- Wulandari, S., et al. (2023). "Implikasi Ekonomi dari Kebijakan JKN." *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*.